

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se-Kabupaten Malinau, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2019. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparan, partisipasi dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2019 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2019.

Malinau, 31 Maret 2020


BUPATI MALINAU
[Handwritten Signature]
Dr. YANSEN TP, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU INSPEKTORAT

Jl. Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301402/409
MALINAU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2019 menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Malinau. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2019 telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2019.

Malinau, 27 Maret 2020

INSPEKTUR *ib*
KABUPATEN MALINAU,

PRAMADIYO BUSONO, Ak., M.A.P., CA
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19641015 198603 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- c. Partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 telah menetapkan 23 sasaran dengan 29 indikator kinerja. Kesemuanya diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Sedangkan pelaksana program dan kegiatan tersebut adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malinau.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,27	13,18	99,33%
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,62	8,65	100,35%
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	72,00	71,42	99,19%
		Prevalensi Balita Stunting	26	20,2	122,30%
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	7,2	6,96	103%
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi yang aktif terlibat dalam musrenbang	37,44	36,44	98%
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	21	49,68	236%
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	81	87	107%
6	Meningkatkan konektivitas antar kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	85	95,41	112%
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa	Pendapatan perkapita masyarakat	91.365.071	96.993.079	105,15%
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	0,298	-	-
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,50	4,13	151,41%
10	Mengembangkan	Persentase	45,9	49,9	108,71%



	produk unggulan	desa yang memiliki produk unggulan			
11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	6,54	8,55	130,73%
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	17,36	44,54	256,56%
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	1:400	1:201	326.46%
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	0	0	0%
15	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<1,0	1,4	35,00%
		Indeks kualitas udara (ISPU)	0-50	93,72	187,44%
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	100%
		Nilai Sakip	BB	CC	73,33%
		Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	100%
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	90	73,93	82,14%
18	Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	75	74,01	98,68%
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	80	94	112%
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	7000	21.592	308%



21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	95	100	105%
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan	71	100	140%
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	C	75%



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Reviu	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU	2
C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.....	9
D. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	12
E. MAKSUD DAN TUJUAN	29
F. SUMBER DAYA MANUSIA.....	30
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN	32

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021	35
1. VISI	36
2. MISI	38
3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	40
4. INDIKATOR KINERJA	41
5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
6. PROGRAM	46
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	48
G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	55
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	57
C. REALISASI ANGGARAN	89

BAB IV PENUTUP	91
-----------------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten malinau	8
Tabel 1.2	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019	8
Tabel 1.3	Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan	31
Tabel 3.1	Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Mutu Pendidikan.....	58
Tabel 3.2	Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	60
Tabel 3.3	Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	62
Tabel 3.3.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Malinau 2017-2019	62
Tabel 3.4	Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Partisipatif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa	63
Tabel 3.5	Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Infrastruktur Daerah Baik Di perkotaan Maupun Perdesaan.....	64
Tabel 3.5.1	Data Status Jalan Kabupaten Malinau	65
Tabel 3.6	Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	66
Tabel 3.7	Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpuh pada ekonomi desa dan perkotaan	67
Tabel 3.8	Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	68
Tabel 3.9	Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Terbukanya Lapangan Pekerjaan	69
Tabel 3.10	Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Mengembangkan produk unggulan	70
Tabel 3.11	Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	72
Tabel 3.12	Evaluasi Pencapaian Sasaran 12 Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	73
Tabel 3.13	Evaluasi Pencapaian Sasaran 13 Meningkatnya Fasilitas Layanan Keagamaan	74
Tabel 3.14	Evaluasi Pencapaian Sasaran 14 Terjaganya Keamanan dan Ketertiban dari Konflik SARA	75
Tabel 3.15	Evaluasi Pencapaian Sasaran 15 Meningkatnya kualitas air dan udara	76
Tabel 3.16	Evaluasi Pencapaian Sasaran 16 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.....	77
Tabel 3.16.1	Capaian kinerja AKIP Kabupaten Malinau Tahun 2018	79



Tabel 3.17	Evaluasi Pencapaian Sasaran 17 Meningkatnya kesetaraan gender	80
Tabel 3.18	Evaluasi Pencapaian Sasaran 18 Meningkatnya pemberdayaan gender	81
Tabel 3.19	Evaluasi Pencapaian Sasaran 19 Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	82
Tabel 3.20	Evaluasi Pencapaian Sasaran 20 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	84
Tabel 3.20.1	Data Kunjungan Wisatawan	84
Tabel 3.21	Evaluasi Pencapaian Sasaran 21 Meningkatkan Kualitas Seni dan Budaya Daerah	85
Tabel 3.22	Evaluasi Pencapaian Sasaran 22 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	86
Tabel 3.22.1	Daftar Situs Cagar Budaya Kabupaten Malinau	87
Tabel 3.23	Evaluasi Pencapaian Sasaran 23 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malinau menuju *good government* dan *clean government* itulah maka jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau berusaha menyajikan Laporan Kinerja untuk kegiatan Tahun 2019. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2019 ini disusun dalam empat bab masing-masing Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan Kinerja, Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja, Bab IV berisi Penutup.



Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021. Substansi pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang pada gilirannya pelaporan ini prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam visi, misi dan program strategis RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2019, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD), berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan konsep *good governance*, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada tahun 2019.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU

Kabupaten Malinau, yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



1. KONDISI GEOGRAFIS

Sesuai dengan kondisi geografis, Kabupaten Malinau beriklim tropikahumida dengan curah hujan berkisar antara 2.500 ≥ 4.500 mm per tahun, temperatur udara rata-rata 26 °C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara 5°C – 7 °C, temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Nopember sampai dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Kabupaten Malinau termasuk Kabupaten yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang sangat potensial dan bervariasi jenisnya, antara lain, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan budi daya hasil-hasilnya, pertambangan (batu bara, pasir kuarsa, emas, dll) dan pariwisata.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kabupaten yang berbatasan dengan Malinau oleh Tim Penegasan Batas Daerah (BPD) Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2019, maka luas wilayah Kabupaten Malinau sebesar 38.973,56 km² yang merupakan daratan dengan topografi bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng, dan ketinggian dari permukaan laut dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 80.822 jiwa.

Sebagai daerah pegunungan dan perbukitan, Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata dan konservasi alam. Akan tetapi jika dilihat dari letak geografisnya, wilayah Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah perdagangan karbon, karena 91 % wilayahnya masih berupa hutan murni.

2. KONDISI DEMOGRAFIS

1. Letak Geografis

Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Malinau terletak



antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" Lintang Utara. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan ; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Tanah Tidung, Berau dan Kutai Timur; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Hulu, dan Kutai Kartanegara; dan sebelah barat berbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak).

Secara Administratif Kabupaten Malinau berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Nunukan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur (Serawak).



Gambar 1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau



Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan, 5 Kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, 2 Kecamatan merupakan penyangga perbatasan (lihat Gambar 1.1), dimana Kabupaten Malinau termasuk sebagai Kabupaten perbatasan yang hanya dapat terjangkau melalui transportasi sungai dan udara yang menuntut biaya sangat tinggi dalam upaya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.

Keadaan topografi Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Selanjutnya juga dapat dibedakan atas kawasan perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang bagian tengah, dan daratan bergelombang landai di bagian timur. Perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m – 3.000 m diatas permukaan laut. Keadaan perbukitan lereng ini memiliki sudut lereng lebih dari 30% dan untuk daerah yang merupakan dataran tinggi, kemiringan berkisar 8 – 15%. Sedangkan untuk daerah perbukitan, kemiringan sangat terjal di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0-50%.

Ditinjau dari segi administrasi, wilayah Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan, yakni:

1. **Kecamatan Malinau Kota**, terdiri atas 6 desa yakni: Desa Malinau Kota, Desa Malinau Hulu, Desa Malinau Hilir, Desa Tanjung Keranjang, Desa Batu Lidung, Desa Pelita Kanaan;
2. **Kecamatan Malinau Utara**, terdiri atas 12 desa yakni: Desa Respen Tubu, Desa Semenggaris, Desa Putat, Desa Malinau Seberang, Desa Luso, Desa Belayan, Desa Kaliamok, Desa Lubak Manis, Desa Kelapis, Desa Salap, Desa Seruyung, Desa Sembuak Warod;
3. **Kecamatan Malinau Barat**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Tanjung Lapang, Desa Kuala Lapang, Desa Taras, Desa Sesua, Desa Sempayang, Desa Sentaban, Desa Long Knipe, Desa Long Bila, Desa Punan Bengalun;



4. **Kecamatan Malinau Selatan**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Paya Saturan, Desa Punan Rian, Desa Laban Nyarit, Desa Nunuk Tanah Kibang, Desa Langap, Desa Long Loreh, Desa Sengayan, Desa Pelencau, Desa Bila Bekayuk;
5. **Kecamatan Mentarang**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Long Bisai, Desa Paking, Desa Long Gafid, Desa Harapan Maju, Desa Mentarang Baru, Desa Temalang, Desa Long Liku, Desa Lidung Keminci, Desa Pulau Sapi;
6. **Kecamatan Mentarang Hulu**, terdiri atas 7 desa yakni: Desa Lung Barang, Desa Lung Sulit, Desa Lung Mekatif, Desa Lung Kebinu, Desa Semamu, Desa Lung Pala dan Desa Lung Simau;
7. **Kecamatan Pujungan**, terdiri atas 9 desa yakni : Desa Long Lame, Desa Long Aran, Desa Long Pua, Desa Long Paliran, Desa Belaka Pitau, Desa Long Jelet, Desa Long Ketaman, Desa Pujungan, Desa Long Bena;
8. **Kecamatan Bahau Hulu**, terdiri atas 6 desa yakni : Desa Long Alango, Desa Long Tebulo, Desa Long Uli, Desa Long Kemuat, Desa Long Berini, Desa Apau Ping;
9. **Kecamatan Sungai Boh**, terdiri atas 6 desa yakni : Desa Mahak Baru, Desa Dumu Mahak, Desa Long Lebusan, Desa Agung Baru, Desa Data Baru, Desa Long Top;
10. **Kecamatan Kayan Hulu**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Nawang Baru, Desa Long Temuyat, Desa Long Payau, Desa Long Betaoh, Desa Long Nawang;
11. **Kecamatan Kayan Hilir**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Data Dian, Desa Sungai Anai, Desa Long Sule, Desa Long Metun, Desa Long Pipa;
12. **Kecamatan Kayan Selatan**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Long Ampung, Desa Long Uro, Desa Metulang, Desa Sungai Barang, Desa Lidung Payau;
13. **Kecamatan Malinau Selatan Hulu**, terdiri atas 8 Desa yakni : Desa Long Lake, Desa Punan Mirau, Desa Long Rat, Desa Halanga, Desa Metut, Desa Long Jalan, Desa Nahakramo Baru, Desa Tanjung Nanga.



14. **Kecamatan Malinau Selatan Hilir**, terdiri atas 8 Desa yakni : Desa Setulang, Desa Setarap, Desa Punan Setarap, Desa Batu Kajang, Desa Gong Solok, Desa Punan Gong Solok, Desa Long Adiu dan Desa Punan Long Adiu;
15. **Kecamatan Sungai Tubu**, terdiri dari 5 Desa yakni Desa Long Titi, Desa Long Ranau, Desa Rian Tubu, Desa Long Nyau, Desa Long Pada.

2. Gambaran Umum Demografis

Masalah kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan itu sendiri.

Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan data kependudukan sangat diperlukan baik mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, komposisi maupun penyebaran/kepadatan penduduk suatu wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Malinau per Desember 2019 sebanyak 80.822 jiwa yang terdiri dari 42.512 laki-laki dan 38.310 perempuan.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau terbesar ada di Kecamatan Malinau Kota sebesar 25.009 jiwa, disusul Kecamatan Malinau Utara sebesar 14.648 jiwa dan Malinau Barat sebesar 11.255 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil ada di Kecamatan Sungai Tubu sebesar 901 jiwa dan Kecamatan Mentarang Hulu sebesar 1.067 jiwa.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang paling luas wilayahnya pasca pemekaran wilayah di Kalimantan Utara (UU No. 20 tahun 2012) yakni sekitar 54,8 persen dari luas Kalimantan utara, dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Ini berarti bahwa kurang seimbang antara jumlah penduduk dengan luas Kabupaten Malinau.

**Tabel 1.1****Luas Wilayah Kabupaten Malinau Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
			Km ²	%
1	Malinau Kota	6	142,07	0,35
2	Malinau Utara	12	1.091,19	2,72
3	Malinau Barat	9	767,12	1,91
4	Malinau Selatan	9	1.153,35	2,88
5	Mentarang	9	535,15	1,33
6	Mentarang Hulu	7	2.924,65	7,30
7	Pujungan	9	6.539,39	16,31
8	Bahau Hulu	6	3.098,98	7,73
9	Sungai Boh	6	3.112,18	7,76
10	Kayan Hulu	5	735,40	1,83
11	Kayan Hilir	5	11.863,19	29,59
12	Kayan Selatan	5	3.138,59	7,83
13	Malinau Selatan Hulu	8	2.171,14	5,42
14	Malinau Selatan Hilir	8	572,20	1,43
15	Sungai Tubu	5	2.243,78	5,60
Jumlah		109	40.088,41	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Malinau pada tahun 2019, penduduk Kabupaten Malinau berjumlah 80.822 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 42.512 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 38.310 jiwa.

Tabel 1.2**Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019**

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Malinau Kota	13.019	11.990	25.009
2	Malinau Utara	7.769	6.879	14.648
3	Malinau Barat	5.895	5.360	11.255
4	Malinau Selatan	2.474	2.106	4.580



5	Mentarang	3.069	2.919	5.988
6	Mentarang Hulu	560	507	1.067
7	Pujungan	1.009	909	1.918
8	Bahau Hulu	779	635	1.414
9	Sungai Boh	1.320	1.164	2.484
10	Kayan Hulu	1.318	1.191	2.509
11	Kayan Hilir	865	708	1.573
12	Kayan Selatan	1.013	973	1.986
13	Malinau Selatan Hulu	1.353	1.157	2.510
14	Malinau Selatan Hilir	1.589	1.391	2.980
15	Sungai Tubu	480	421	901
Jumlah		42.512	38.310	80.822

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2019

C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri atas kewenangan wajib meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;



7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malinau juga menyelenggarakan urusan lain-lain yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah (Tipe A);
- b. Sekretariat DPRD (Tipe C);
- c. Inspektorat Daerah (Tipe A);
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan
- g. Kecamatan

Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan (Tipe B);
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tipe A);
- c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);



- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial (Tipe A);
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B);
- g. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe C);
- i.1 Dinas Ketenagakerjaan (Tipe C)
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B);
- k. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A);
- l. Dinas Perhubungan (Tipe C);
- m. Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B);
- n. Dinas Pertanian (Tipe C);
- o. Dinas Perikanan (Tipe C);
- p. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
- r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran (Tipe A).

Badan Daerah terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Tipe A);
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tipe A);
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe C);

Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain terdiri dari:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- b. Badan Pengelola Perbatasan daerah (Tipe A)

Kecamatan terdiri dari:

- a. Kecamatan Malinau Kota (Tipe A);
- b. Kecamatan Malinau Utara (Tipe A);
- c. Kecamatan Malinau Barat (Tipe A);
- d. Kecamatan Malinau Selatan (Tipe A);
- e. Kecamatan Mentarang (Tipe A);
- f. Kecamatan Mentarang Hulu (Tipe A);
- g. Kecamatan Pujungan (Tipe A);
- h. Kecamatan Bahau Hulu (Tipe A);



- i. Kecamatan Sungai Boh (Tipe A);
- j. Kecamatan Kayan Hulu (Tipe A);
- k. Kecamatan Kayan Hilir (Tipe A);
- l. Kecamatan Kayan Selatan (Tipe A);
- m. Kecamatan Malinau Selatan Hulu (Tipe A);
- n. Kecamatan Malinau Selatan Hilir (Tipe A); dan
- o. Kecamatan Sungai Tubu (Tipe A);

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Analisis isu strategis Kabupaten Malinau dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021. Selain itu, analisis isu strategis Kabupaten Malinau juga mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang dapat menjamin upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang (2016-2021).

Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran antara target dan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Malinau.

1. Permasalahan Geografi dan Demografi

Kabupaten Malinau, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 tahun 1999, memiliki dua penyebutan sebagai “Kabupaten Perbatasan dan Kabupaten Konservasi” . dengan Wilayah Kabupaten Malinau yang sangat luas dan sebagian besar merupakan kawasan hutan, dataran dengan aliran sungai, daerah pegunungan, dan kawasan perbatasan serta Luas Wilayah Konservatif tentu memiliki beban pembangunan daerah. Dari sisi kawasan Perbatasan Permasalahan utama yang harus diatasi adalah ketertinggalan dan keterisolasian masyarakat desa yang tinggal di daerah pedalaman, pegunungan dan perbatasan; serta kesenjangan antar desa. Dari sisi Kawasan Konservatif Kabupaten Malinau terbatas untuk mengelola kawasan Hutan Produktif



yang menghambat eksploitasi hutan guna kepentingan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah.

Melihat dari pertumbuhan penduduk Kabupaten Malinau dari tahun ketahun semakin meningkat. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Malinau adalah sebesar 62.580 jiwa. Sementara pada tahun 2019, jumlah penduduk mencapai 80.822 jiwa. Peningkatan yang cukup tinggi ini diindikasikan karena adanya perpindahan penduduk yang datang ke Malinau (imigrasi). Di satu sisi, penambahan penduduk akan menjadi potensi peningkatan produksi. Di sisi lain, penambahan penduduk akan menjadi beban daerah apabila penduduk dari luar daerah tidak mempunyai keterampilan dan tidak mempunyai permodalan. Permasalahan yang harus diatasi adalah kurang meratanya persebaran penduduk antarkecamatan, belum tertatanya administrasi kependudukan, dan terbatasnya prasarana dan sarana publik.

Selain itu, Sebagai dampak dari penurunan harga komoditas tambang dan perkebunan, perlambatan kegiatan pertambangan dan perkebunan, pemutusan hubungan kerja, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Malinau cenderung meningkat. Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Desa Membangun, belum efektifnya program dan kegiatan yang bersifat padat karya dari SKPD dan belum adanya realisasi kerjasama investasi dengan pelaku usaha untuk menciptakan kesempatan kerja baru.

2. Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat

a. Perekonomian Daerah

Melihat dampak penurunan permintaan komoditas pertambangan dan perkebunan membawa dampak terjadinya penurunan produksi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau. Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya kerjasama antar perangkat daerah dalam mendorong percepatan dan pemulihan ekonomi daerah, belum adanya sinergi antara perangkat daerah dan pemerintah desa dalam mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan,



belum berkembangnya kerjasama investasi dan perdagangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.

Struktur ekonomi Kabupaten Malinau saat ini menunjukkan dominasi kegiatan berbasis sumber daya alam terutama pertanian, pertambangan dan penggalian dengan total sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Malinau secara rata-rata lebih dari 50 persen. Tingginya ketergantungan pada pertambangan dan penggalian membuat perekonomian Kabupaten Malinau sangat rentan terhadap gejolak dan fluktuasi harga batubara di pasar internasional. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

b. Permasalahan Pembangunan Manusia

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau menunjukkan kemajuan pembangunan terutama pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah terbatasnya tenaga pendidikan dan kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan; serta belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

c. Permasalahan Kemiskinan

Penduduk Kabupaten Malinau sebagian besar tinggal di daerah perdesaan dengan taraf hidup yang terbatas. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan terutama Gerakan Desa Membangun telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Pada tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan persentase penduduk miskin cenderung tidak stabil dari kisaran 7,26% hingga 7,68% dari total penduduk Kabupaten Malinau.



Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Malinau bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi. Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya kerjasama antar OPD dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar rakyat perdesaan terutama dalam hal penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi; belum optimalnya kerjasama antar OPD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat; belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi pertanian; serta belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

d. Permasalahan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Malinau bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa wisata/budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional, Inovasi dan kreatifitas dalam mengelola museum sebagai aset daerah yang bernilai tinggi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah;
- b) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal;
- c) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;
- d) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak;
- e) Terbatasnya sarana dan prasarana pelaku budaya/kesenian daerah;
- f) Inovasi dan kreatifitas pelaku kesenian/budaya masih rendah;



- g) Kualitas sumber daya manusia pelaku budaya masih terbatas;
- h) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial.

Selain itu, dalam mewujudkan peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa atau dapat dikatakan sebagai tulang punggung bangsa untuk masa yang akan datang, peranan pemuda sangatlah penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang handal serta dalam pembangunan daerah. Potensi, peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai selama ini cukup berdampak pada kemajuan pembangunan Kabupaten Malinau namun beragam permasalahan dan kendala yang dihadapi menjadi penghambat dalam pengembangan pembangunan kepemudaan dan olahraga. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi:

- a) Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah;
- b) Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkoba, miras masih cukup tinggi;
- c) Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga belum memadai;
- d) Jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda masih rendah;
- e) Pemuda belum sebagai “agent of change”;
- f) Pembinaan olahraga belum optimal;
- g) Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal.

3. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

a. Permasalahan Pendidikan

Angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Malinau untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tercatat masih rendah yang menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.



Perluasan jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Malinau sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Sampai saat ini ketersediaan jumlah sekolah dan guru untuk jenjang SMP/MTs masih belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

Pelayanan pendidikan tinggi di Politeknik Kabupaten Malinau terus berkembang. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan lulusan politeknik dan belum berkembangnya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Malinau.

b. Permasalahan Kesehatan

Pengembangan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Selain itu, derajat kesehatan masyarakat juga sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat dan ketersediaan pasokan makanan dan gizi; serta perbaikan prasarana dan sarana sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.

Permasalahan yang harus diatasi dalam kurun waktu 2016-2021 adalah terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan, belum optimalnya Puskesmas dan Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa; terbatasnya jumlah tenaga kesehatan terutama dokter umum dan dokter spesialis, tenaga farmasi dan ahli gizi untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan; serta belum optimalnya Rumah Sakit Umum Daerah sebagai rumah sakit rujukan.



4. Permasalahan Prasarana dan Sarana Daerah

a. Permasalahan Transportasi

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang baik antar desa, antar kecamatan antar kabupaten dan antar negara. Transportasi di Kabupaten Malinau mencakup pengembangan transportasi darat, sungai, laut dan udara. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jalan beraspal dibanding keseluruhan panjang jalan, dan sebagian besar jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini menyebabkan kurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antar desa dan antar kecamatan. Selain itu, Pembangunan jalan Negara dan jalan provinsi realisasinya selama lima tahun terakhir masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total jalan yang dibutuhkan untuk dibangun. Kondisi ini menyiratkan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Malinau. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya transportasi darat yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran.

Kondisi prasarana dan sarana transportasi darat berupa jalan di Kabupaten Malinau sebagian besar masih berupa jalan tanah. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya akses jalan terutama di daerah pedalaman dan perbatasan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan barang, membuka keterisolasian dan mempercepat kemajuan desa.

Dari segi intensitas transportasi udara, jumlah penerbangan dan jumlah penumpang di Kabupaten Malinau terus meningkat. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya lapangan terbang perintis; serta terbatasnya jangkauan dan jalur penerbangan terutama menuju



desa-desa dan kecamatan-kecamatan di daerah pedalaman dan perbatasan.

Transportasi sungai dan laut di Kabupaten Malinau juga terus meningkat terutama transportasi barang dari luar daerah masuk ke Kabupaten Malinau. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya tambatan perahu dan pelabuhan, dan terbatasnya jangkauan transportasi air untuk mengangkut hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

b. Permasalahan Komunikasi dan Informasi

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peran sangat penting dalam menghubungkan antar penduduk dan antar desa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Perkembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau secara bertahap semakin baik. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

c. Permasalahan Air Minum

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Perkembangan rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Malinau menunjukkan adanya perbaikan terhadap akses air bersih. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah belum optimalnya pengelolaan sumber air baku dan terbatasnya jaringan air bersih yang murah dan terjangkau terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

d. Permasalahan Listrik

Ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Rumah tangga pengguna utama listrik di Kabupaten Malinau telah mencapai lebih dari 60 persen.



Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah belum optimalnya jangkauan pelayanan listrik bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

5. Isu Strategis

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

(1) Identifikasi dan Analisis Kekuatan Kabupaten Malinau

Berbagai sumber daya sebagai kekuatan yang diperkirakan dapat mendukung pembangunan Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Kabupaten Malinau merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya pertanian dan pertambangan;
- b. Kabupaten Malinau memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat sehingga menjadi perekat dan pemersatu masyarakat dalam memajukan Kabupaten Malinau;
- c. Kabupaten Malinau memiliki keragaman sumber daya alam hayati yang beragam, dan memiliki potensi jasa lingkungan kehutanan;
- d. Kabupaten Malinau telah mengembangkan desa wisata dan destinasi wisata budaya sebagai modal bagi pengembangan ekonomi wilayah;
- e. Kabupaten Malinau merupakan kabupaten yang sudah berjalan selama 18 tahun sehingga penuh harapan dan dinamika untuk meraih kemajuan;
- f. Kabupaten Malinau berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dengan kemiripan dan persamaan budaya lokal yang unik sebagai dasar membangun kemitraan dan kerjasama yang bermanfaat, adil dan saling menguntungkan;



- g. Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) sejak tahun 2012 secara bertahap telah menumbuhkan kesadaran, semangat dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan kehidupan desa;
- h. Kabupaten Malinau telah melaksanakan berbagai terobosan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah terutama di desa dan kecamatan;
- i. Pelaksanaan pemilihan Ketua RT menjadi bagian dari berkembangnya dan manajemen kepemimpinan di tingkat RT yang demokratis, transparan dan akuntabel sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- j. Perkembangan forum partisipasi dan komunikasi pembangunan desa memperkuat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga memperkuat dukungan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Malinau.

(2) Identifikasi dan Analisis Kelemahan Kabupaten Malinau

Berbagai kelemahan yang diperkirakan dapat menghambat kemajuan pembangunan Kabupaten Malinau, yaitu :

- a. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga akan berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, dan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Belum siapnya masyarakat menghadapi pergeseran budaya dan perkembangan teknologi informasi yang cepat sehingga membawa dampak terjadinya budaya kagetan dan memudarnya nilai-nilai budaya masyarakat Malinau;
- c. Belum meratanya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan; prasarana dan sarana air bersih, pembangkit dan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi;



- d. Belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu terutama bagi masyarakat desa;
- e. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan di desa dan kecamatan yang disebabkan oleh belum tertatanya kelembagaan secara memadai, terbatasnya prasarana dan sarana pemerintahan, serta terbatasnya jumlah dan mutu sumber daya aparatur;
- f. Belum berkembangnya adanya industri hilir yang mampu mengolah sumber daya alam, khususnya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan menjadi komoditas industri yang memiliki nilai tambah;
- g. Belum berkembangnya kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
- h. Masih terbatasnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam terutama pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan sebagai akibat terbatasnya modal, sarana dan prasarana pendukung;
- i. Belum tertatanya infrastruktur perekonomian (jaringan jalan, transportasi, pembangkit dan jaringan listrik, dan air baku) yang menghambat pengembangan usaha.
- j. Terbatasnya kapasitas birokrasi dan aparatur daerah akan menghambat upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah;
- k. Belum optimalnya penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Malinau akan menghambat pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan;
- l. Belum tertatanya manajemen kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah akan menyebabkan pengelolaan sumber daya daerah menjadi kurang efisien dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- m. Belum adanya manajemen pengembangan kecamatan yang terpadu dan terukur akan menghambat kemajuan pembangunan daerah;
- n. Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan pertanian, perkebunan,



perikanan dan peternakan, industri pengolahan dan pariwisata di Kabupaten Malinau akan menyebabkan kurangnya daya tarik dan daya saing daerah.

(3) Identifikasi dan Analisis Peluang Kabupaten Malinau

Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar nasional dan pasar internasional secara lebih terbuka dan cepat memberi peluang bagi masa depan Kabupaten Malinau, yaitu :

- a. Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang dari dan ke Kabupaten Malinau;
- b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kabupaten Malinau;
- c. Perluasan jaringan dan kerjasama internasional baik Masyarakat Ekonomi ASEAN, kerjasama APEC dan kerjasama internasional lainnya akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparat Pemerintah Kabupaten Malinau;
- d. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi dan produksi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, pariwisata dan perdagangan dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Malinau;
- e. Perluasan jaringan dan kerjasama investasi, perdagangan dan pariwisata nasional dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan dan pariwisata Kabupaten Malinau baik wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata kuliner; perluasan kesempatan kerja; peningkatan pendapatan; dan perluasan jaringan sosial budaya masyarakat.



Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu :

- a. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya;
- b. Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dan aset daerah akan didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan gender, keistimewaan, kekhususan dan keragaman masyarakat;
- c. Proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan; serta pengendalian dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, aman, nyaman, bermutu dan bermartabat.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dan sumber daya yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu :

- a. Perluasan kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan kemajuan daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten Malinau akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, maju, cepat, mudah, terjangkau dan bermutu;



- c. Pemerintah Kabupaten Malinau dapat mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Malinau;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah akan memperhitungkan penghormatan, perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial budaya daerah, kearifan lokal, kekhususan dan keragaman masyarakat.

(4) Identifikasi dan Analisis Ancaman Daerah

Globalisasi membawa dampak negatif yang dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Malinau, yaitu :

- a. Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan Kabupaten Malinau akan mendorong pemanfaatan lahan dan wilayah secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kerusakan lingkungan dan menghambat kesinambungan pembangunan;
- b. Perdagangan yang terus meningkat mendorong arus masuk barang dari luar baik dari kabupaten/kota lain maupun dari negara lain secara lebih cepat dan lebih banyak dan selanjutnya akan mendominasi pasar lokal di Kabupaten Malinau yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Malinau;
- c. Krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi dan menurunnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, meningkatkan angka kriminalitas, dan menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Malinau.

Demokratisasi memerlukan proses pendidikan politik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ketidaksiapan dalam melaksanakan demokrasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi rakyat Kabupaten Malinau, yaitu :



- a. Praktik demokrasi secara partisipatif dan konsultatif antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Malinau dengan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada kelambanan dalam pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan;
- b. Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan tanpa batas dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kehidupan masyarakat di Kabupaten Malinau;
- c. Tata kelola politik yang cenderung rumit, adanya dominasi elit dan terjadinya konflik menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat di Kabupaten Malinau.

Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu efektifitas, kelancaran dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Malinau;
- b. Persaingan antar daerah dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah; penetapan daerah perbatasan; serta pengelolaan infrastruktur cenderung meningkat, menimbulkan konflik dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan jangka panjang sehingga menghambat kemajuan daerah;
- c. Lemahnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan dan penganggaran menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan



- sumber daya alam dan lingkungan; lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah terutama jalan, transportasi udara dan sungai; kurang efektifnya pelayanan publik; serta kurang optimalnya pengembangan ekonomi;
- d. Meningkatnya kesenjangan antara Kabupaten Malinau dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara mendorong migrasi penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Malinau sehingga menyebabkan meningkatnya beban penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman; pendidikan dan kesehatan; dan tempat usaha.

Dengan memperhatikan permasalahan dan analisis lingkungan strategis eksternal dan internal, isu strategis daerah Kabupaten Malinau dalam lima tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- a. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
- b. Belum optimalnya kinerja pelayanan pemerintahan terutama di desa dan kecamatan;
- c. Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan;
- d. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
- e. Belum tertatanya manajemen aset daerah;
- f. Belum berkembangnya manajemen pengetahuan sebagai pondasi kemajuan daerah.

2. Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia

- a. Belum meratanya akses layanan pendidikan yang bermutu disebabkan antara lain oleh kurangnya prasarana dan sarana,



- terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
- b. Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan, serta kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. Memudarnya penerapan nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan masyarakat;
 - d. Belum berkembangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan pemudi;
 - e. Rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.

3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah

- a. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- b. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari industri kerajinan dan rumah tangga;
- c. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata;
- d. Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- e. Belum tertatanya manajemen dan kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
- f. Belum berkembangnya kegiatan penanaman modal dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah sebagai akibat adanya hambatan status lahan,



belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antar daerah;

- g. Belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi desa;
- h. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah.

4. Belum tertatanya infrastruktur daerah

- a. Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Malinau;
- b. Belum meratanya pembangunan jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan dan arteri sekunder yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan;
- c. Terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
- d. Belum tertatanya jaringan sanitasi dan air bersih.
- e. Terbatasnya transportasi darat, udara, dan sungai terutama dalam menghubungkan antar desa dan antar kecamatan;
- f. Belum adanya keterpaduan sistem transportasi antara darat, sungai dan udara yang menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Malinau;
- g. Terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi.

5. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

- a. Kurangnya kerjasama dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam pelestarian lingkungan;
- b. Meningkatnya konflik pemanfaatan lahan;
- c. Menurunnya daya dukung lingkungan;
- d. Belum optimalnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dini dalam menghadapi potensi bencana alam.



E. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Sistem Pelaporan Kinerja.

Esensi dari sistem Pelaporan Kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Malinau adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian sektor publik di Kabupaten Malinau. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten dapat diwujudkan melalui implemementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang terencana dan terlaksana baik. Implemementasi sistem Pelaporan Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran strategis pemerintah Kabupaten Malinau dan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau yang diperoleh. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kinerjanya dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pelaporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu;

1. Pelaporan Kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Presiden, DPRD dan masyarakat).
2. Pelaporan Kinerja adalah sarana upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama Pelaporan Kinerja tersebut merupakan



cerminan dan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Pelaporan Kinerja 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Malinau atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2019.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi menjadikan Pelaporan Kinerja 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Malinau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Malinau dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau periode 31 Desember 2019 sebanyak 3.499 orang terdiri dari Pria 1.892 orang dan Wanita 1.607 orang dengan komposisi menurut tingkat golongan yang sesuai pada tabel data sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	I/a	0	0	0
2	I/b	9	2	11
3	I/c	11	2	13
4	I/d	16	5	21
Jumlah Golongan I		36	9	45



5	II/a	48	25	73
6	II/b	108	68	176
7	II/c	122	125	247
8	II/d	298	254	552
Jumlah Golongan II		576	472	1048
9	III/a	267	390	657
10	III/b	261	239	500
11	III/c	233	196	429
12	III/d	241	152	393
Jumlah Golongan III		1002	977	1979
13	IV/a	190	129	319
14	IV/b	68	19	87
15	IV/c	19	1	20
16	IV/d	1	0	1
17	IV/e	0	0	0
Jumlah Golongan IV		278	149	427
TOTAL		1.892	1.607	3.499

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, 2019

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam pelaporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sasaran yang bersifat strategis, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, terbatas pada indikator input, output dan outcome. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya berasal dari APBN dan Loan/BLN yang juga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau, disajikan secara terpisah dan tidak dilakukan pengukuran kinerja untuk masing-masing kegiatan tersebut.



Pelaporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan di masa datang.

Sistematika penyajian Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Malinau dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja 2019.

Bab II Perencanaan Kinerja; menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Malinau untuk periode 2016-2021 dan rencana kinerja untuk Tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasif yang akan diambil. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, termasuk analisis terhadap capaian indikator efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Bab IV Penutup; menjelaskan simpulan menyeluruh dari Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2019 ini dan menguraikan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan oleh DPRD Malinau dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran



tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016–2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7. Oleh karena itu, sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah tahun 2019 digunakan RPJMD yang telah ditetapkan, yaitu RPJMD tahun 2016-2021 ditambah dengan APBD Tahun 2019.

RPJMD Malinau sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat pemilihnya, yang akan dicapai dalam periode 2016 - 2021. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Malinau juga memperhatikan tujuan, sasaran dan program-program pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan jangka menengah tersebut disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumberdaya dan dana, serta hasil-hasil (keluaran dan manfaat) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan manfaat yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran.



RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Dengan memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; mempertimbangkan kemajuan pembangunan Kabupaten Malinau yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhitungkan hasil analisis isu strategis; memperhatikan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025; mengacu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih untuk masa bakti 2016-2021; mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019; serta mengutamakan semangat “Gerakan Desa Membangun” dengan bertumpu pada kekuatan rakyat, yaitu “Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat”; maka visi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016–2021 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”

Visi tersebut mengandung makna bahwa

- **MAJU** adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;
- **SEJAHTERA** adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan



dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralitas, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- **Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)** adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera, Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

GERDEMA didasarkan pada semboyan atau tekad Malinau Berubah Maju Sejahtera yang mengandung semangat untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malinau bersama-sama berubah dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan. Berubah untuk maju dan maju untuk menggapai kesejahteraan. GERDEMA juga berangkat dari kekuatan pemikiran bahwa membangun Malinau itu harus dimulai dari desa. Desa adalah tempat dan komunitas masyarakat Malinau. Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera ditentukan oleh kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang maju dan sejahtera adalah wujud nyata dari Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera.

GERDEMA adalah paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau dengan bertumpu pada kekuatan rakyat yaitu, “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada kepercayaan sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan. GERDEMA menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan.



Paradigma GERDEMA juga merupakan pembaharuan dari paradigma pembangunan sebelumnya, sebagai wujud konsistensi penerapan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Desa ditempatkan sebagai suatu daerah otonom. Penetapan GERDEMA sebagai paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau menegaskan dan sekaligus meluruskan cita-cita Otonomi Desa. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 menegaskan sikap yang konsisten dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan pembangunan.

2. M I S I

Berdasarkan visi pembangunan tersebut, misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
- (2) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
- (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
- (4) Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
- (5) Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;
- (6) Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;



- (7) Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
- (8) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;
- (9) Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (10) Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
- (11) Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
- (12) Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan tersebut, pilar pembangunan dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan Ekonomi Desa dan Keunggulan Daerah;
4. Ibu Kota Malinau Menjadi Ibu Kota Mandiri;
5. Reformasi Birokrasi Fokus Pada Pelayanan Prima.

Selain itu komitmen daerah dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Revitalisasi Pertanian Untuk Ketahanan Pangan;
2. Ibu Kota Kabupaten Menjadi Kota Mandiri;
3. Malinau Sebagai Tujuan Wisata Nasional dan Internasional;
4. Pengembangan RSUD Kabupaten Malinau sebagai Rumah Sakit Rujukan.



3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

3.1 Tujuan

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Meningkatkan infrastruktur dasar.
4. Meningkatnya perekonomian daerah.
5. Meningkatnya produksi pertanian secara luas.
6. Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri.
7. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA.
9. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
10. Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
11. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata.
12. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima.

3.2 Sasaran

1. Meningkatnya mutu pendidikan.
2. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Menurunnya kemiskinan di perdesaan.
4. Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
5. Meningkatnya infrastruktur daerah baik dipertanian maupun perdesaan.
6. Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan.
7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan.
8. Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi.
9. Terbukanya lapangan pekerjaan.
10. Mengembangkan produk unggulan.



11. Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan.
12. Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa.
13. Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan.
14. Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA.
15. Meningkatkan kualitas air dan udara.
16. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
17. Meningkatnya kesetaraan gender.
18. Meningkatnya pemberdayaan gender.
19. Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan.
20. Meningkatkan kunjungan wisatawan.
21. Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah
22. Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah
23. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

4. INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik				
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Meningkatnya mutu pendidikan	Harapan lama sekolah
				Rata-rata lama sekolah
			Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup
				Prevelensi balita stunting
Misi 2 : Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi				
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin
			Meningkatnya partisipatif masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat yang



			dalam perencanaan pembangunan desa	aktif dalam musrenbang
--	--	--	------------------------------------	------------------------

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;				
3	Meningkatnya infrastruktur dasar	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	Meningkatnya infrastruktur daerah baik dipertanian maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik / mantap
			Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa dengan air bersih yang berkualitas
				Persentase desa yang terjangkau komunikasi

Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;				
4	Meningkatnya perekonomian daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan perkapita masyarakat
			Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks gini

Misi 5 : Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;				
5	Meningkatnya produksi pertanian secara luas	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran
			Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan

Misi 6 : Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



6	Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya nilai tambahan dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri

Misi 7 : Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;

7	Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	Persentase konflik SARA yang diselesaikan	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk
			Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras

Misi 8 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;

8	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas air dan udara.	Indeks kualitas air
				Indeks kualitas udara (ISPU)

Misi 9 : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

9	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)
				Nilai saki
				Nilai LPPD



Misi 10 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;				
10	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender
			Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender
			Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

Misi 11 : Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;				
11	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan
			Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif
			Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan

Misi 12 : Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat;				
12	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan. Strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 menekankan pada perubahan (transformasi) dan percepatan



(akselerasi) pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik dengan menyempurnakan dan mempertajam pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) yang didukung dengan pelaksanaan tiga program unggulan.

Selain itu strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Berikut diuraikan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Malinau dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sejalan dengan arahan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025, pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dibagi dalam tahapan arah kebijakan pembangunan dengan prioritas pada penguatan landasan pembangunan, penegasan pengembangan dan pemanfaatan momentum pembangunan, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut dapat dilihat pada gambar berikut mengenai arah kebijakan.

Tahapan Pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021:

- **2016**
Menyiapkan landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Kabupaten Malinau.
- **2017**
Memperkuat landasan bagi percepatan (akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) pembangunan Kabupaten Malinau.
- **2018**
Memperkuat dan memantapkan percepatan (akselerasi) dan Pembaharuan (transformasi) Pembangunan Kabupaten Malinau terutama peningkatan penyediaan infrastruktur, dan Pengembangan UMKM.
- **2019**
Memantapkan percepatan (akselerasi) dan perubahan (transformasi) pembangunan berbasis industri pengolahan hasil perikanan dan



pertanian di Kabupaten Malinau; serta peningkatan mutu pariwisata.

➤ **2020**

Pemantapan percepatan (akselerasi) dan perubahan (transformasi) sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau.

➤ **2021**

Mewujudkan Malinau yang maju dan sejahtera secara nyata sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau.

6. PROGRAM

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program utama dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016-2021, maka kebijakan umum dikaitkan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

(1) Prioritas 1: RT BERSIH

- a. Program RT BERSIH merupakan program unggulan yang menjadi bagian dari penajaman dan perluasan pelaksanaan GERDEMA untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemajuan desa. Program RT-BERSIH adalah pembangunan berbasis RT (Rukun Tetangga) yang meletakkan tempat (*locus*) pembangunan di tingkat RT;
- b. Program RT-BERSIH menempatkan warga RT sebagai pelaku utama yang aktif dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola sumber daya di tingkat RT dan mengembangkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Ketua dan pengurus RT bersama warga setempat yang merupakan unit komunitas terkecil (*grass root*) sebagai basis dan sekaligus pelaku utama pembangunan yang terlibat langsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama;
- c. Program ini dilaksanakan dengan menyediakan Dana RT BERSIH sekurang-kurangnya sebesar Rp.260 juta setiap tahun untuk setiap RT, dengan rincian Dana Tunjangan dan Operasional kepada



RT sekurang-kurangnya Rp. 60 juta per tahun; dan Dana Program RT BERSIH sekurang-kurangnya sebesar Rp. 200 juta per tahun.

- (2) Prioritas 2: Wajib Belajar Enam Belas Tahun dengan Bebas SPP dan bebas pungutan biaya pendidikan dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- (3) Prioritas 3: Beras Daerah (RASDA) bagi kepentingan konsumsi rakyat Malinau dan kebijakan subsidi beras sejahtera kepada masyarakat yang tidak mampu melalui kebijakan RASDA yang diperoleh dari produksi petani Malinau;
- (4) Prioritas 4: Optimalisasi Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa secara murni;
- (5) Prioritas 5: Optimalisasi Dana Operasional Kecamatan, dan Dana Gerdema kepada dusun dan RT;
- (6) Prioritas 6: Peningkatan pemberian modal usaha tanpa jaminan dan bunga kepada kelompok usaha ekonomi lemah yang ada di desa, RT dan dusun;
- (7) Prioritas 7: Penyediaan Beasiswa kepada anak-anak Malinau yang tidak mampu dan berprestasi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- (8) Prioritas 8: Pelaksanaan Tugas Belajar bagi anak yang berprestasi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi kejuruan;
- (9) Prioritas 9: Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) bagi anak-anak yang putus sekolah dan bagi mereka yang ingin memperoleh keterampilan tertentu;
- (10) Prioritas 10: Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gratis (Jamkesda) terutama masyarakat yang tidak mampu;
- (11) Prioritas 11: Pembangunan Infrastruktur Kota Mandiri bagi Ibukota Malinau;
- (12) Prioritas 12: Perbaikan Tingkat Kesejahteraan PNS, Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Adat dan Aparat Adat, Ketua BPB dan Anggota, Ketua LPM dan Anggota.
- (13) Prioritas 13: Peningkatan Mutu Pelayanan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) di setiap Kecamatan;



- (14) Prioritas 14: Pengembangan Resi Gudang di setiap Kecamatan untuk menampung hasil pertanian dalam arti luas;
- (15) Prioritas 15: Peningkatan Partisipasi Swasta dalam berinvestasi dan pengembangan usaha dan pasar dalam daerah, antar daerah, antar pulau dan internasional terhadap produk lokal melalui pemberian insentif dan kemudahan regulasi;
- (16) Prioritas 16: Pengembangan Dana Kredit Usaha Persiapan Pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS).

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	13,27
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,62



2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	72,00
		Prevalensi balita stunting	%	26
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	%	7,2
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam peren canaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam musrenbang	%	37,44
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	%	21
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	%	81
6	Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	%	85
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan perkapita masyarakat	Rp	91.365.071
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks gini	Nilai	0,298
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	%	8,50
10	Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan	%	45,9
11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	%	6,54
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	%	17,36
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio tempat ibadah per penduduk	Rasio	1:400



14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	%	0
15	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	Indeks	0<IP<1,0
		Indeks kualitas udara(ISPU)	Indeks	0-50
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP
		Nilai Sakip	Nilai	BB
		Nilai LPPD	Status	Tinggi
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	%	90
18	Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	%	75
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	80
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	Jumlah	7000
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	%	95
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (cagar budaya)	%	71
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	Indeks	B

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :



1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



BUPATI MALINAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tanda tangan di bawa ini:

Nama : Dr. YANSEN TP, M.Si

Jabatan : BUPATI MALINAU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malinau , 26 Februari 2019


BUPATI MALINAU

Dr. YANSEN TP, M.Si

**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas			
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Harapan lama sekolah	13,27
		Rata-rata lama sekolah	8,62
2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	72,00
		Prevalensi balita stunting	26
Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa			
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	7,2
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam musrenbang	37,44
Tujuan 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar			
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	21
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	81
6	Meningkatnya konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	85
Tujuan 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah			
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan Perkapita masyarakat	91.365.071
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks gini	0,298
Tujuan 5 : Meningkatkan produksi pertanian secara luas			
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,50
10	Mengembangkan produk unggulan	Jumlah desa yang memiliki produk unggulan	45,9
Tujuan 6 : Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri			
11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	5,54
12	Meningkatnya nilai tambah	Tingkat pertumbuhan	17,36



	dan pendapatan industri barang dan jasa	industri	
Tujuan 7 : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai			
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio tempat ibadah per penduduk	1:400
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik sara	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	0%
Tujuan 8 : Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA			
15	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<1,0
		Indeks kualitas udara(ISPU)	0-50
Tujuan 9 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel			
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)	WTP
		Nilai Sakip	BB
		Nilai LPPD	Tinggi
Tujuan 10 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan			
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	90%
18	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	75%
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	80%
Tujuan 11 : meningkatkan kontribusi sektor pariwisata			
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	7.000
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	95
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (cagar budaya)	71
Tujuan 12 : Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima			
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	B



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,27	13,18	99,33%
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,62	8,65	100,35%
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	72,00	71,42	99,19%
		Prevalensi Balita Stunting	26	20,2	122,30%
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	7,2	6,96	103%
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam musrenbang	37,44	36,44	98%



5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	21	49,68	236%
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	81	87	107%
6	Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	85	95,41	112%
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan perkapita masyarakat	91.365.071	96.993.079	105,15%
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	0,298	-	-
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,50	4,13	151,41%
10	Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan	45,9	49,9	108,71%
11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	6,54	8,55	130,73%
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	17,36	44,54	256,56%
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	1:400	1:201	326.46%
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	0	0	0%
15	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<1,0	1,4	35,00%
		Indeks kualitas udara (ISPU)	0-50	93,72	187,44%



16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	100%
		Nilai SAKIP	BB	CC	73,33%
		Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	100%
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	90	73,93	82,14%
18	Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	75	74,01	98,68%
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	80	94	112%
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	7000	21.592	308%
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	95	100	105%
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya)	71	100	140%
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	C	75%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.



Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 23 sasaran selama tahun 2019 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian sangat rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Melalui Upaya Penyediaan Tenaga Kerja Terampil Dan Terdidik

Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas melalui 2 Sasaran dengan 4 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel. 3.I
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Mutu Pendidikan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Harapan Lama Sekolah	Tahun	100%	13,26	12,89	97,20%	13,27	13,18	99,33%
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	103%	8,61	8,47	98,37%	8,62	8,65	100,35%



Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung harapan lama sekolah yaitu:

$$HLS_a^t = FK \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana :

HLS_a^t : Harapan Lama sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : jumlah penduduk usia i yang bersekolah ditahun

t

I : Usia (a,a+1,.....,n)

Untuk tahun 2019 pencapaian kinerja harapan lama sekolah Kabupaten Malinau sesuai data yang diterima dari Dinas Pendidikan adalah 99,33%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi untuk tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi sehingga realisasi kinerja belum mencapai target yang telah ditentukan yakni :

- a) Kurang pemerataan akses pendidikan salah satunya adalah ketersediaan sekolah tidak menjangkau semua wilayah desa terutama SD dan SMP.
- b) Belum meratanya penempatan dan ketersediaan guru.

Sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Untuk tahun 2019 capaian kinerja rata-rata lama sekolah adalah 100,35% dari target 8,62 dan realisasi 8,65. Tercapainya rata-rata lama sekolah karena sebagian masyarakat sudah mengikuti pendidikan S1, S2 dan S3.



Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Angka harapan hidup	Tahun	99,84%	71,50	71,3	99,7%	72,00	71,42	99,19%
Prevalensi Balita Stunting	%	100%	26,5	32,2	121,5%	26	20,2	122,30%

Dalam mencapai tujuan Kabupaten Malinau yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka sasaran strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malinau sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2016-2021 adalah meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat yang memiliki dua indikator yaitu:

1. Angka Harapan Hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Malinau dengan target pada tahun 2019 adalah 72,00 persen, realisasi untuk tahun 2019 adalah 71,42 persen dan capaian untuk tahun 2019 adalah 99,19 persen. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-10. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir dan mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan Angka Harapan Hidup yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Pada tabel di atas diketahui bahwa realisasi untuk tahun 2019 masih rendah atau belum tercapainya target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu masih



terdapat angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pada tahun 2019 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Malinau yaitu 124 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu 16,8 per 1000 kelahiran hidup. meskipun realisasi angka harapan hidup tahun 2019 lebih rendah dari target, akan tetapi mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2018. Pada tahun 2018 realisasi angka harapan hidup adalah 71,3.

2. Prevalensi Balita Stunting.

Capaian Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Malinau pada tahun 2019 yaitu 20,2 persen dari target yang telah ditetapkan adalah 26 persen. Keberhasilan ini dikarenakan integrasi dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malinau dan ditunjang oleh dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik. untuk dana DAK fisik, Kabupaten Malinau mendapatkan DAK penugasan untuk intervensi stunting, sedangkan untuk DAK non fisik yaitu adanya dana BOK stunting.

Misi 2 : Meningkatkan Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Pengukuran Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.



Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase penduduk miskin	%	100%	7,62	7,68	100%	7,2	6,96	103%

Tingkat kemiskinan Kabupaten Malinau dari tahun ke tahun secara garis besar menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Pada tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan persentase penduduk miskin yang terus menurun namun pada tahun 2017 terjadi sedikit peningkatan penduduk miskin sebesar 0,92 persen. Pada tabel di atas dengan sasaran menurunnya kemiskinan di perdesaan dengan indikator kinerja persentase penduduk miskin yang ditarget tahun 2019 adalah 7,2% dan realisasi 6.96%.

Tabel 3.3.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Malinau 2017-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin(persen)
1	2	3
2017	6,69	8,06
2018	6,63	7,68
2019	6,23	6,96

Sumber Data : BPS Kabupaten Malinau

Jika diamati dari tabel di atas maka jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Malinau tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau pada tahun 2019 tidak hanya terjadi secara jumlah, namun juga secara persentase. Jumlah, penduduk miskin Kabupaten Malinau tahun 2019 menurun sebanyak 0,4 ribu penduduk dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan secara persentase mengalami penurunan sebesar 0,72%.



Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Partisipatif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dalam musrenbang	%	100%	36,73	36,73	100%	37,44	36,44	98%

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau. Melalui musrenbang rancangan dokumen pembangunan daerah RKPD dibahas untuk memperoleh tanggapan, penajaman dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang dan pada akhir acara ini akan disepakati dan menjadi acuan penyusunan rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan pembangunan desa, desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti pemerintahan desa (kepala desa dan perangkat desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama antar desa dan badan usaha milik desa untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kegiatan musrenbang pada tahun 2019 telah terlaksana dengan baik (100 persen) yakni telah dilaksanakan di 109 desa se-Kabupaten Malinau. Pelaksanaan kegiatan musrenbang berlangsung sesuai tahapan dan jadwal kegiatan musrenbang disetiap desa yang didampingi oleh tim musrenbang desa kabupaten. Partisipasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan musrenbang desa telah diikuti oleh seluruh perwakilan masyarakat antara lain LPM, BPD, Aparat Desa, Karang Taruna, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.



Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalam maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu : jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;

Tujuan : Meningkatnya infrastruktur dasar

Pengukuran Tujuan Meningkatnya infrastruktur dasar daerah melalui 2 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Infrastruktur Daerah Baik Di perkotaan Maupun Perdesaan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	%	62,55%	20	49,82	249%	21	49,68	236%
Persentase desa dengan air bersih yang berkualitas	%	-	69	104	150%	81	87	107%

Pada tabel di atas pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur daerah baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan indikator Persentase jalan dalam kondisi baik atau mantap untuk tahun 2019 ditargetkan 21% dengan realisasi 49,68% dan capaian 236%. Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase desa dengan air bersih yang berkualitas dengan target 81% dan untuk capaian tahun 2019 sebesar 87 dan capaian tahun 2018 adalah 107%.



Tabel 3.5.1

Data Status Jalan Kabupaten Malinau

URAIAN	JALAN KABUPATEN		
	2017	2018	2019
PANJANG JALAN BERDASARKAN JENIS PEMUKIMAN (KM)			
a. Aspal	219.12	165.03	168.99
b. Kerikil	37.82	225.95	224.20
c. Tanah/Belum Tembus	68.37	652.22	650.00
TOTAL PANJANG JALAN	325.32	1043.20	1043.20
PANJANG JALAN BERDASARKAN KONDISI JALAN (KM)			
a. Baik	192.60	68.06	72.02
b. Sedang	88.54	451.74	446.26
c. Rusak Ringan	27.74	113.84	116.50
d. Rusak Berat	16.44	409.56	408.43
TOTAL PANJANG JALAN	325.32	1043.20	1043.20
PANJANG JALAN BERDASARKAN KELAS JALAN (KM)			
a. Kelas III	325.32	1043.20	1043.20
TOTAL PANJANG JALAN	325.32	1043.20	1043.20
PENDANAAN APBD BIDANG JALAN			
a. APBD Kabupaten Malinau	176,109,102,44 7.00	58,827,371,287.0 0	34,510,348,960. 00
b. DAK Bidang Jalan	37,000,000,000. 00	17,171,000,000.0 0	42,396,261,000. 00
TOTAL JUMLAH PENDANAAN	213,109,102,44 7.00	75,998,371,278.0 0	76,906,609,960. 00

Sumber : Dinas PUPR-Perkim, 2019



Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase desa yang terjangkau komunikasi	%	127,21%	80	92,7	115,8%	85	95,41	112%

Target RPJMD tahun 2019 untuk sasaran strategis meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan dengan indikator kinerja persentase desa yang terjangkau komunikasi yang dibebankan pada Dinas Kominfo dengan target 85% dan hasil yang dicapai pada tahun 2019 adalah 95,41% yakni melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya realisasi dari target yang telah ditentukan yaitu:

1. Keseriusan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.
2. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Provider terkait.
3. Fokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Memaksimalkan anggaran yang tersedia seefisien mungkin.
5. Aktif komunikasi dan koordinasi secara internal.

Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;

Tujuan : Meningkatnya perekonomian daerah



Pengukuran Tujuan Meningkatnya perekonomian daerah melalui 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumbuh pada ekonomi desa dan perkotaan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pendapatan perkapita masyarakat	RP	95,31%	90.331.820	425.000.000	470%	91.365.071	96.993.079	105,15%

Struktur perekonomian Kabupaten Malinau pada tahun 2019 masih didominasi oleh 3 lapangan usaha utama antara lain pertambangan dan penggalian (50,01 Persen), Konstruksi (16,13 persen) dan pertanian, kehutanan dan perikanan (10,93 persen).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau periode 2016-2019 berfluktuasi. Pada tahun 2016 ekonomi Malinau terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yaitu 1,99 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Malinau tumbuh sebesar 5,99 persen atau mengalami percepatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 terjadi perlambatan ekonomi yang signifikan dengan angka pertumbuhan sebesar 5,74 persen. Akan tetapi pada tahun 2019 perekonomian Malinau kembali tumbuh sebesar 6,34 persen.

Untuk pendapatan perkapita masyarakat tahun 2019 dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD adalah Rp. 91.365.071, realisasi tahun 2019 Rp. 96.993.079 dan capaian yang diperoleh untuk tahun 2019 adalah 105,15 persen.



Tabel 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Gini		100%	0,300	0,300	100%	0,298	-	-

Sesuai dengan informasi dari BPS Provinsi Kalimantan Utara dan BPS Kabupaten Malinau bahwa untuk indeks gini kabupaten/kota BPS tidak mempublikasikannya, hanya Indeks Gini Provinsi yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara. Realisasi indeks gini Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 per semester 1 adalah 0,300.

Misi 5 : Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;

Tujuan : Meningkatnya Produksi Pertanian Secara Luas

Pengukuran Tujuan **Meningkatnya produksi pertanian secara luas** melalui 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.



Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya angka pengangguran	%	129%	8,51	6,77	120,4%	8,50	4,13	151,41%

Dari tabel di atas bahwa sasaran terbukanya lapangan pekerjaan dengan indikator kinerja menurunnya angka pengangguran untuk tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar 151,41% dari target 8,50% dan terealisasi 4.13%. Dapat diuraikan bahwa jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 di Kabupaten Malinau adalah 43.487 orang atau sekitar 68,86 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Angka ini menunjukkan besarnya partisipasi angkatan kerja atau sekitar 68,86 persen penduduk usia kerja aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Selanjutnya jika dilihat lebih dalam lagi dari 68,86 persen penduduk angkatan kerja tersebut 95,87 persen merupakan penduduk yang aktif bekerja maupun sementara tidak bekerja. Sementara tidak bekerja dalam hal ini adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok, termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum bekerja. Sedangkan sisanya 4,13 persen atau 1.794 orang merupakan pengangguran terbuka di Kabupaten Malinau tahun 2019.

Kegiatan Utama	Tahun 2019		
	Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan selama satu minggu yang Tahun Lalu (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + perempuan
1. Angkatan Kerja	29021	14466	43487
1.1. Bekerja	27844	13849	41693
1.2. Pengangguran	1177	617	1794



2. Bukan Angkatan Kerja	5881	13788	19669
2.1. Sekolah	3279	2810	6089
2.2. Mengurus Rumah Tangga	1454	10170	11624
2.3 Lainnya	1148	808	1956
Jumlah	34902	28254	63156
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	83.15	51.20	68,86
Tingkat Pengangguran	4.06	4.27	4.13

Sumber : BPS kabupaten Malinau 2019

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran di Kabupaten Malinau belum menurun secara signifikan karena;

- Meningkatnya jumlah pencari kerja, disisi lain pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai (antara pencari kerja dan daya serap lapangan pekerjaan tidak seimbang) sehingga memberikan imbas yang cukup berat bagi tenaga kerja di Kabupaten Malinau.
- Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja serta tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga-lembaga pendidikan formal;
- Meningkatnya jumlah pencari kerja dari luar daerah ke Kabupaten Malinau.

Tabel. 10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Mengembangkan produk unggulan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
persentase desa yang memiliki produk unggulan	%	72%	27,5	27,5	100%	45,9	49,9	108,71%



Dari tabel di atas dengan sasaran mengembangkan produk unggulan dengan indikator kinerja persentase desa yang memiliki produk unggulan untuk tahun 2019 capaian kinerja sebesar 108,71 persen dari target 45,9 persen dan realisasi 49,9 persen. Sesuai data yang diterima dari Dinas Pertanian bahwa capaian kinerja tahun 2019 dengan indikator persentase desa yang memiliki produk unggulan mengalami peningkatan karena :

- Capaian 100 persen dikarenakan bahwa target 50 desa dari 109 desa memiliki produk unggulan yang telah dikembangkan.
- Produk unggulan desa yang dikembangkan adalah padi yang merupakan produk unggulan daerah dan program unggulan daerah (Beras Daerah/Rasda).
- Khusus tanaman pangan dalam hal ini pemenuhan Rasda, maka tiap desa yang dimaksud telah berkontribusi untuk menjual gabah kepada PERUSDA INTIMUNG dan beras dari hasil gilingan masyarakat pada pasar tradisional.
- Limapuluh (50) desa yang dimaksud di atas tersebar di kecamatan yakni Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Malinau Selatan Hilir.

Misi 6 : Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;

Tujuan : Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri

Pengukuran Tujuan **Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri** melalui 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.



Tabel 3.11
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tingkat pertumbuhan perdagangan	%	-	5,66	5,66	100%	6,54	8,55	130,73%

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Berdasarkan jenisnya, perdagangan dapat dibedakan menjadi 4 yaitu;

- Perdagangan besar (memiliki kekayaan bersih lebih dari sepuluh miliar rupiah).
- Perdagangan menengah (kekayaan bersih lima ratus juta sampai sepuluh miliar rupiah).
- Perdagangan kecil (kekayaan bersih lima puluh juta sampai lima ratus juta rupiah).
- Perdagangan mikro (kekayaan bersih kurang dari lima puluh juta rupiah).

Dari tabel di atas sasaran Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan dengan indikator kinerja Tingkat pertumbuhan perdagangan yang ditargetkan tahun 2019 adalah 5,54 dan realisasi 8,55 dengan capaian tahun 2019 adalah 130,73% artinya sudah terpenuhi target yang telah ditetapkan. Tingkat pertumbuhan perdagangan mengalami kenaikan karena adanya peningkatan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara terhadap perusahaan perdagangan kendaraan bahwa penjualan kendaraan mengalami kenaikan. Kenaikan penjualan ini didorong oleh tingginya permintaan kendaraan dan alat dari usaha pertambangan. Sedangkan untuk perdagangan eceran juga mengalami



peningkatan karena adanya permintaan dari masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tingkat pertumbuhan industri	%	-	17,01	60	352%	17,36	44,54	256,56%

Dari tabel di atas dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa dengan indikator kinerja Tingkat pertumbuhan industri yang ditargetkan tahun 2019 adalah 17,36 dengan realisasi 44,54.

Dalam menghitung tingkat pertumbuhan industri menurut data yang diterima dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

- Jumlah IKM tahun 2018 : 824 Unit
- Jumlah IKM tahun 2019 : 1191 Unit.
- Rumus untuk mencari tingkat pertumbuhan industri:

$$\frac{\text{Jumlah IKM tahun 2019} - \text{Jumlah IKM tahun 2018}}{\text{Jumlah IKM tahun 2018}} \times 100$$

Misi 7 : Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;

Tujuan : Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Harmonis, Rukun Dan Damai



Pengukuran Tujuan mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai secara luas melalui 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel 3.13
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Meningkatnya Fasilitas Layanan Keagamaan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	Rasio	100%	1:450	1:325	72,22%	1:400	1:201	326.46%

1. Jumlah rumah ibadah tahun 2019 berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Malinau sebanyak 262 Rumah Ibadah dan jumlah penduduk Kabupaten Malinau pada tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 80.822 jiwa.
2. Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan rumah ibadat saat ini adalah 1:201 dari target 1:400 dengan demikian capaian sasaran OPD tahun 2019 adalah 326.46%.
3. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan fasilitas layanan keagamaan walupun di tengah kondisi keuangan/anggaran yang sangat terbatas.



Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Terjaganya Keamanan dan Ketertiban dari Konflik SARA

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase konflik antar suku, agama dan ras	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Pada tabel di atas dengan sasaran terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA dengan indikator persentase konflik antar suku, agama, ras dan golongan dengan target 0 persen dan realisasi 0 persen. Hal ini dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik pihak keamanan, pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, pemuka agama, organisasi pemuda, organisasi wanita dan semua masyarakat Kabupaten Malinau untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar suku, agama ras dan golongan.

Misi 8 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;

Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA

Pengukuran Tujuan Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA secara luas melalui 1 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.



Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 15
Meningkatnya kualitas air dan udara

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks kualitas air	Nilai	81,25%	0<IP<5,0	4,02	100,5%	0<IP<1,0	1,4	35,00%
Indeks kualitas udara (ISPU)	Nilai	92,87%	0-50	91,51	183,02%	0-50	93,72	187,44%

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara dengan indikator indeks kualitas air tahun 2019 adalah 1,4. Hal ini berarti bahwa kondisi kualitas air tersebut statusnya adalah **tercemar ringan atau *slightly polluted*** (sesuai dengan kategori kelas indeks polusi yaitu $1,0 < IP \leq 5,0$ = tercemar).

Sedangkan untuk pencapaian indeks kualitas udara (ISPU) Kabupaten di tahun 2019 sebesar 93,72. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara tersebut statusnya **sedang** yang artinya tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika (sesuai dengan rentang indeks standar pencemaran udara (ISPU) yaitu sedang = 51-100).

Misi 9 : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel



Pengukuran Tujuan Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel secara luas melalui 1 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)	Opini	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
Nilai Sakip	Nilai	100%	B	CC	86.3%	BB	CC	773,33%
Nilai LPPD	Status	100%	Tinggi	Tinggi	100%	Tinggi	Tinggi	100%

Pada tabel 16 di atas dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja:

1. Capaian Status laporan keuangan daerah Kabupaten Malinau tahun 2019 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan mencapai target dikarenakan;
 - Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan;
 - Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang;



- Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP terhadap lima (5) komponen inti manajemen kinerja atas implementasi SAKIP Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan sistem evaluasi sederhana atau *desk evaluation*, diperoleh nilai/skor sebesar 55,00 yang masuk dalam katagori CC (Cukup). Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala nilai SAKIP Kabupaten Malinau yang masih berada di kategori CC (Cukup) yaitu;
- Rata-rata hasil penilaian capaian organisasi terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam komponen **Perencanaan Kinerja** pada AKIP Kabupaten Malinau tahun 2018 adalah belum memenuhi standar bobot penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 30,00%.
 - Rata-rata hasil penilaian capaian organisasi terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam komponen **Pengukuran Kinerja** pada AKIP Kabupaten Malinau tahun 2018 belum memenuhi standar bobot penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 25,00%
 - Rata-rata hasil penilaian capaian organisasi terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam komponen **Pelaporan Kinerja** pada AKIP Kabupaten Malinau tahun 2018 belum memenuhi standar bobot penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15,00%
 - Rata-rata hasil penilaian capaian organisasi terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam komponen **Evaluasi Internal** pada AKIP Kabupaten Malinau tahun 2018 belum memenuhi standar bobot penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 10,00%
 - Rata-rata hasil penilaian capaian organisasi terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam komponen **Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi** pada AKIP Kabupaten Malinau tahun



2018 belum memenuhi standar bobot penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 10,00%

Tabel 3.16.1

Capaian Kinerja AKIP Kabupaten Malinau Tahun 2018

A. Perencanaan Kinerja (30%)		21.97
I	Perencanaan Strategis (10%)	7.51
II	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)	14,46
B. Pengukuran Kinerja (25%)		11,58
I	Pemenuhan Pengukuran (5%)	3.72
II	Kualitas Pengukuran (12,5%)	5.98
III	Implementasi Pengukuran (7,5%)	1.88
C. Pelaporan Kinerja (15%)		8.83
I	Pemenuhan Pelaporan (3%)	2.86
II	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	3.80
III	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	2.17
D. Evaluasi Internal (10%)		2.18
I	Pemenuhan Evaluasi (2%)	1.25
II	Kualitas Evaluasi (5%)	0.68
III	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	0.25
E. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi (20%)		10.44
I	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (5%)	3.00
II	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (5%)	3.92
III	Benchmark Kinerja (5%)	2.69
IV	Kinerja Lainnya (5%)	0.83

Untuk mencapai target Nilai SAKIP Kabupaten Malinau yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau, maka kedepan akan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap komponen-komponen yang bobot nilainya masih kurang.

3. Nilai LLPD Kabupaten Malinau tahun 2019 adalah 2.8710 dengan capaian Tinggi.



Misi 10 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;

Tujuan : Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Pengukuran Tujuan Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan secara luas melalui 3 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 17
Meningkatnya kesetaraan gender

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks pembangunan gender	%	76,60%	85	73,77	86,78%	90	73,93	82,14%

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diformulasikan sebagai rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki. Nilai indeks pembangunan perempuan dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka indeks pembangunan gender ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2019 jumlah penduduk perempuan kabupaten Malinau adalah 38.310 jiwa, dan dari data jumlah penduduk perempuan yang mempunyai pendidikan adalah 28.131 jiwa. Untuk menghitung indeks pembangunan gender formulasi yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{jumlah penduduk perempuan menurut pendidikan}}{\text{jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$$



Dengan formulasi di atas maka realisasi kinerja tahun 2019 adalah 79,93% yakni hasil dari jumlah penduduk perempuan berpendidikan (28.131) jiwa dibagi jumlah penduduk perempuan (38.310) jiwa dikali 100%. Untuk capaian kinerja tahun 2019 adalah 82,14%.

Tabel 3.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 18
Meningkatnya pemberdayaan gender

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks pemberdayaan gender	%	106%	70%	73,78%	105,4%	75	74,01	98,68%

Indeks pemberdayaan gender dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Indeks pemberdayaan gender digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknis. Indeks pemberdayaan gender digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender kabupaten Malinau tahun 2019 adalah 98,68%. Untuk menghitung realisasi indeks pemberdayaan gender adalah jumlah pekerja perempuan pada lembaga pemerintahan (2.831) jiwa dan jumlah pekerja perempuan pada lembaga non pemerintah (25.523) jiwa. Dari jumlah perempuan pada lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dibagi dengan jumlah penduduk perempuan Kabupaten Malinau tahun 2019.

Indeks Pemberdayaan Gender hampir mencapai target yang telah ditargetkan karena :

- Adanya dorongan perempuan dalam meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat.



- b) Memberikan bimbingan dan motivasi di segala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga.

Tabel 3.19
Evaluasi Pencapaian Sasaran 19
Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	100%	75%	72%	96%	80	94	112%

Organisasi kepemudaan mempunyai banyak manfaat. Tidak hanya mendapat teori organisasi tetapi banyak mendapat pengalaman langsung mengenai manajemen organisasi, budaya organisasi, komunikasi organisasi dan pengembangan organisasi. Selain itu juga mengasah jiwa kepemimpinan dan kebijaksanaan diri bagi para pemuda ketika mereka aktif di dalam organisasi. Pada tabel di atas evaluasi sasaran meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan dengan indikator kinerja persentase organisasi kepemudaan yang aktif untuk tahun 2019 dengan realisasi 94% dari target 80% dengan capaian 112%. Adapun organisasi kepemudaan yang aktif di Kabupaten Malinau yaitu:

- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
- KB POLRI Kabupaten Malinau
- Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Malinau
- Pemuda Muslimin Kabupaten Malinau
- Pemuda Katolik Kabupaten Malinau
- Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Utara (Malinau)
- Generasi Muda Tanjung Lapang (GEMTAL) Malinau
- Forum Komunikasi Generasi Muda Mentarang (FKGMM)
- Himpunan Pemuda Tenguyung (HPT) Kabupaten Malinai
- Pemuda Flobamora Kabupaten Malinau
- Karang Taruna Kecamatan Malinau



- Karang Taruna Kecamatan Mentarang
- Pemuda Demokrat IB Kabupaten Malinau
- Persekutuan Pemuda Dayak Abay Kabupaten Malinau
- Karang Taruna Kecamatan Malinau Barat
- Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (APMI) Malinau
- Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Malinau
- Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
- Forum Komunikasi Putra/putri Perwira TNI-Polri Indonesia Cabang Malinau
- Karang Taruna Bina Kami Desa Malinau Kota
- FKPPI Kabupaten Malinau
- Himpunana Kerukunan Putra/Putri Wredatama (HKPPW) Malinau
- Karang Taruna Piah Perun Desa
- Laskar Pemuda Dayak Kalimantan Utara
- Forum Pemuda Seni Penekendi Kec. Malinau Utara
- Pemuda Pancasila Kabupaten Malinau
- Himpunan Pemuda Raja
- Forum Generasi Muda (FORGEMA) Kabupaten Malinau
- Persatuan Pemuda GKII Daerah Malinau
- Badan Pengurus Pemuda Pelita Kanaan (BPPDK-PK)
- Pemuda Peduli Kelestarian Lingkungan Hidup (PPKH-LH)
- Perkumpulan Mahasiswa dan Pelajar Dayak Berusu

Misi 11 : Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;

Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata secara luas melalui 3 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses



implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Tabel 3.20
Evaluasi Pencapaian Sasaran 20
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah wisatawan	Orang	91,86%	6.500	35.823	551,12%	7.000	21.592	308%

Kabupaten Malinau memiliki berbagai macam objek wisata, baik objek wisata alam maupun wisata budaya. Tingkat kunjungan wisata di berbagai objek di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diketahui bahwa wisatawan yang berkunjung ke berbagai objek wisata pada umumnya adalah wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Pada tabel di atas realisasi meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator kinerja jumlah wisatawan dengan target tahun 2019 adalah 7.000 orang, terealisasi 21.592 orang.

Tabel 3.20.1
Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Malinau

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kunjungan Wisnus	3.770	4.813	34.842	21.271
2	Jumlah Kunjungan Wisman	230	137	981	321
Jumlah Kunjungan Wisatawan		4.000	4.950	35.823	21.592

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malinau, 2019



Tabel 3.21
Evaluasi Pencapaian Sasaran 21
Meningkatkan Kualitas Seni dan Budaya Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase sanggar seni yang aktif	%	100%	90	34	37,78%	95	100	105%

Sanggar seni yang aktif di Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Bebelen Ibenayuk Tengilan
2. Sanggar Seni Umbak Taka
3. Sanggar budaya Tunas Muda Kab. Malinau
4. Sanggar Seni Bangen Tawai
5. Sanggar Seni Pebeka Tawai Malinau
6. Sanggar Seni Busak Baku
7. Sanggar Tari Inculod
8. Sanggar Tari Jonan Madang
9. Sanggar Tari Uyang Lahai
10. Paguyuban Kuda Lumpung Taruna Mudho
11. Sanggar Tari Bangen Tavai Tanjung Keranjang
12. N'caut Dayak Berusu
13. Sanggar Tari Leku Sulau
14. Sanggar Seni Dayak Ulong Da'a
15. Sanggar seni yandalun
16. Sanggar Tari Arang Ndimung
17. Sanggar Seni Engkap Lun
18. Sanggar Tari Tengguyun
19. Sanggar Tari Busak Labu
20. Puling Laring
21. Suwit
22. Kalawon Grup
23. Yolomar Grup



24. Busak Baku
25. Intamu Grup
26. Sayung Midang
27. Luluyun
28. Sayung Idan
29. Sanggar Seni Febaya Ferurung
30. Litul Mentarang
31. Inul Beru
32. Felefet
33. Sanggar Musik Etnis Dan Modern Kerukub Ebu
34. Sanggar Tari Ozed Dame
35. Hulung Pune
36. Lutung Mimbin
37. Ca'kimet Ca'tawai
38. Bangen Udip

Tabel. 22
Evaluasi Pencapaian Sasaran 22
Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase situs budaya yang terdaftar di kementerian kebudayaan	%	100%	57	-	-	71	100	140%

Pada tabel di atas dengan sasaran meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah dengan indikator kinerja persentase situs budaya yang terdaftar di kementerian kebudayaan untuk tahun 2019 dengan target 71% dan realisasi 100%.



Tabel 3.22.1
Daftar Situs Cagar Budaya Kabupaten Malinau

NO	NAMA OBJEK	LOKASI	KECAMATAN
1	Makam Raja Tidung Ke II Raja Tua	Desa Mentarang baru	Kec. Mentarang
2	Tiang Rumah Kerajaan Tidung Malinau Alung kabiran	Desa Malinau Hulu Tanjung Belimbing RT.8	Kec. Malinau Kota
3	Kubur Dayak Berusu dan Merap di Semendurut	Kab. Malinau	Kec. Malinau Barat
4	Kuburan Dayak Merap	Desa Langap	Kec. Malinau Selatan
5	Kuburan Batu Kenyah	Paya Seturan	Kec. Malinau Selatan
6	Kuburan Batu Katembu Long Pulung	Desa Long Brini	Kec. Bahau Hulu
7	Kuburan Lenggang Dan Belawing Dayak Kenyah	Desa Langap	Kec. Malinau Selatan
8	Makam Tidung Muara Kabiran dan Sisah Kuburan Dayak Lundayeh	Desa Kabiran Tepi Sungai Malinau	Kec. Malinau Kota
9	Kuburan Dayak Berusu	Desa Sesua	Kec. Malinau Barat
10	Kuburan Dayak Tinggalan	Desa Belayan	Kec. Malinau Utara
11	Makam Raja Hanifah	Desa Pulau spi	Kec. Mentarang
12	Kuburan Litun Dawat di Semendurut	Desa Setarap	Kec. Malinau Selatan Hilir
13	Kuburan Tanau	Desa Gong Solok	Kec. Malinau Selatan Hilir
14	Lonbong Matuo	Lumbis Induk	Kec. Malinau Utara
15	Kuburan Tajau I	Di sungai Mentarang Hulu	Kec. Mentarang Hulu
16	Kuburan Tajau II	Di sungai Mentarang Hulu	Kec. Mentarang Hulu
17	Kuburan Kuno Dalam Gua	Desa Long Jelet	Pujungan
18	Makam Cina dan Altar Dewa Bumi		
19	Kompleks Makam Kerajaan Tidung I	Jl. Raja Alam RT.6 Desa Malinau Kota	Kec. Malinau Kota
20	Kompleks Makam Kerajaan Tidung II	Jl. Raja Alam RT.6 Desa Malinau Kota	Kec. Malinau Kota
21	Rumah Adat Long Aran (Lu'ung Jalung)	Long Aran	Kec. Pujungan
22	Kuburan Batu Long Berini	Desa Long Berini	Kec. Bahau Hulu
23	Kuburan Tua	Long Nawang	Kec. Kayan Hulu
24	Kuburan Tua Uyang lahai	Desa Data Dian	Kec. Kayan Hilir



25	Batu Irang Dau	Desa Long Ampung	Kec. Kayan Selatan
26	Situs Kubur Tanah Liah	Belayan	Kec. Malinau Utara
27	Kubur Ngona	Sengayan	Kec. Malinau Selatan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malinau, 2019

Misi 12 : Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat;

Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Baik Dan Prima

Pengukuran Tujuan Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Baik Dan Prima secara luas melalui 1 Sasaran dengan 1 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Tabel 3.23
Evaluasi Pencapaian Sasaran 23
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	100%	CC	C	97,40%	B	C	75%

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam penyusunan SKM terdapat 9 (Sembilan) unsur yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya / tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi



pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan saran serta masukan, sarana dan prasarana.

Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran diperlukan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

- Peningkatan percepatan pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan peningkatan;
- Peningkatan ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Menginformasikan hasil dari pada survei kepuasan masyarakat kepada publik.

C. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
1	2	3	4
PENDAPATAN - LRA	1.416.149.819.853,81	1.471.740.961.276,20	103,92
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PDA) - LRA	60.604.697.353,81	70.361.080.273,30	116,10
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	14.509.830.000,00	13.572.119.157,50	93,54
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.146.872.000,00	1.693.507.434,00	147,66
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan -LRA	5.549.995.353,81	5.549.995.353,81	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA	39.398.000.000,00	49.545.458.327,99	125,76
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.355.545.122.500,00	1.386.043.958.922,90	102,24
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA	1.155.183.042.500,00	1.187.322.644.144,00	102,78
Bagi hasil pajak - LRA	35.214.317.200,00	32.195.858.745,00	91,43
Bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam - LRA	148.838.387.300,00	193.032.307.921,00	129,69
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	814.152.557.000,00	814.152.557.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	101.032.377.000,00	97.886.691.067,00	96,89
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	55.945.404.000,00	50.055.229.411,00	89,47



PELAPORAN KINERJA
2019

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LRA	161.528.275.000,00	148.072.875.000,00	91,67
Dana Penyesuaian - LRA	161.528.275.000,00	148.072.875.000,00	91,92
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LRA	30.925.805.000,00	42.620.939.778,90	137,82
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	30.925.805.000,00	42.620.939.778,90	137,82
Bantuan Keuangan -LRA	7.908.000.000,00	8.027.500.000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya -LRA	7.908.000.000,00	8.027.500.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	15.335.922.080,00	0,00
Pendapatan Hibah - LRA	0,00	2.528.000.000,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	2.528.000.000,00	0,00
BELANJA	1.156.634.481.222,59	1.112.522.203.738,00	96,18
BELANJA OPERASI	972.655.670.289,62	936.938.745.462,00	96,32
Belanja Pegawai	492.413.335.871,62	475.652.043.194,00	96,60
Belanja Barang dan Jasa	412.399.697.008,00	396.782.006.547,00	96,21
Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	2.401.130.200,00	80,04
Belanja Hibah	58.619.037.410,00	56.626.115.521,00	96,60
Belanja Bantuan Sosial	6.223.600.000,00	5.477.450.000,00	88,01
BELANJA MODAL	183.749.571.932,97	175.583.458.276,00	95,55
Belanja Modal Tanah	2.913.850.000,00	2.692.520.411,00	92,40
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.091.821.468,97	34.751.331.482,00	93,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.465.249.364,00	60.293.802.288,00	96,52
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.262.401.100,00	76.664.016.846,00	95,52
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00
Belanja Modal Aset Lainnya	999.750.000,00	1.165.287.249,00	116,56
BELANJA TAK TERDUGA	229.239.000,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	229.239.000,00	0,00	0,00
TRANSFER	299.280.874.820,00	307.323.375.000,00	102,68
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	299.280.874.820,00	307.323.375.000,00	102,68
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	299.280.874.820,00	299.295.875.000,00	100,01
SURPLUS/DEFISIT	(39.765.536.188,78)	51.895.382.538,20	(130,50)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.765.536.188,78	237.983.447.540,64	598,46
Penggunaan SILPA	39.765.536.188,78	37.978.980.540,64	95,50
Penerimaan Kembali Piutang lainnya	0,00	4.467.000,00	0,00
Penerimaan kembali investasi non permanen lainnya	0,00	200.000.000.000,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	200.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
Peneluaran investasi Non permanen lainnya	0,00	200.000.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	39.765.536.188,78	37.983.447.540,64	95,51
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	89.878.830.078,84	0,00

Sumber Data : BPKD Kabupaten Malinau (25/02/2020)



BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2019 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau selama tahun 2019 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Malinau akan senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan kinerja ini. Berbagai hasil yang telah diraih oleh Kabupaten Malinau selama ini akan selalu dijadikan modal berharga untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang terjadi dijadikan pelajaran berharga untuk melangkah menuju Malinau yang lebih baik di hari esok.

Mengingat masih ada kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2019, dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk tahun-tahun mendatang akan tetap difokuskan pada :

- Perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan publik.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Government*).
- Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik.
- Penegakan hukum dan perundang-undang, serta perbaikan dalam sistem informasi kinerja pemerintah daerah.



- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja.
- Penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

Dengan tersusunnya Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.



LAMPIRAN



PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,27	Tahun	13,18	99,33%
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,62	Tahun	8,65	100,35%
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	72,00	Tahun	71,42	99,19%
		Prevalensi Balita Stunting	26	%	20,2	122,30%
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	7,2	%	6,96	103%
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam musrenbang	37,44	%	36,44	98%
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	21	%	49,68	236%
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	81	%	87	107%
6	Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	85	%	95,41	112%
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan perkapita masyarakat	91.365.071	Rp	96.993.079	105,15%
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	0,298	Nilai	-	-
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,50	%	4,13	151,41%



10	Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan	45,9	%	49,9	108,71%
11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	6,54	%	8,55	130,73%
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	17,36	%	44,54	256,56%
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio tempat ibadah per Penduduk	1:400	Rasio	1:201	326.46%
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	0	%	0	0%
15	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<1,0	Indeks	1,4	35,00%
		Indeks kualitas udara(ISPU)	0-50	Indeks	93,72	187,44%
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Opini	WTP	100%
		Nilai SAKIP	BB	Nilai	CC	73,33%
		Nilai LPPD	Tinggi	Status	Tinggi	100%
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	90	%	73,93	82,14%
18	Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	75	%	74,01	98,68%
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	80	%	94	112%
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	7000	Jumlah	21.592	308%
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	95	%	100	105%



22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan	71	%	100	140%
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	Indeks	C	75%



**DAFTAR PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN DARI PEMERINTAH PUSAT
SERTA LEMBAGA NIRLABA YANG DIANUGERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019**

NO	NAMA PENGHARGAAN
1	Piagam penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2018. Pada bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki prestasi yang sangat baik yaitu selama lima tahun berturut-turut yaitu tahun anggaran 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 memperoleh piagam penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2	Penghargaan sebagai Top Pembina BUMD tahun 2019 kepada Bupati Malinau dan Top Ceo Bumd tahun 2019 kepada Direktur Pdam Apa' Mening oleh Majalah Business News.
3	Pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-47 Nasional di Padang Provinsi Sumatera Barat, Tim Penggerak PKK Kabupaten Malinau menerima tiga penghargaan dari ketua tim penggerak PKK pusat : a. Penghargaan Adhi Bhakti Madya Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malinau atas pengabdian dan kesetiaan dalam mengelola gerakan PKK selama 17 tahun. b. Penghargaan Pakarti Madya I Tingkat Nasional Pelaksana Terbaik Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Kecamatan Malinau Kota. c. Penghargaan Pakarti Madya I Tingkat Kabupaten Pelaksana Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.
4	Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha dari Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Malinau Sebagai Kepala Daerah Yang Dinilai Berhasil Membina Dan Melahirkan Inovasi Di Desa Tingkat Nasional Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).
5	Pada Lomba Desa Tingkat Nasional, Desa Wisata Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Ditetapkan Sebagai Juara I Regional III atas Prestasinya Menjalankan Pemerintahan Desa Dengan Model Gerdema.



6	Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Paling Inspiratif, Replikatif dan Inovatif dalam Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi.
7	Piagam Penghargaan Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diberikan Kepada Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai Juara I pada Penilaian Kinerja Kabupaten dalam Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi.
8	Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diberikan Kepada Camat Mentarang Sebagai Camat Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.
9	Juara I Tingkat Provinsi Kalimantan Utara sebagai Guru Berprestasi Tingkat SD Atas Nama Birul Asrori, S.Pd dan Mewakili Kabupaten Malinau ke Tingkat Nasional.
10	Juara I Festival Seni Siswa Nasional (FLS2N) Cabang Tari Tradisional Diwakili SMPN 2 Malinau Kota dan Cabang Pantomim Diwakili SDN 002 Malinau Kota.
11	Juara I Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabang Lomba Atletik dari SMPN 1 Mentarang dan Mewakili Kabupaten Malinau Ketingkat Nasional.
12	Juara I Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas Tingkat Provinsi Kalimantan Utara untuk Kategori Pengelola Kelompok Bermain Diwakili Kelompok Bermain Kasih Bunda dan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Diwakili PKBM Alva Omega Batu Lidung.
13	Juara I Sepakbola Gala Siswa Indonesia Diwakili SMPN 1 Malinau Utara tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Berhak Mengikuti ee tingkat Nasional.
14	Sepakbola Putri U-17 Kabupaten Malinau meraih juara I di ajang Piala Menpora U-17 zona Provinsi Kalimantan Utara Dan Berhak Mengikuti Kejuaraan yang sama dengan level yang lebih tinggi, yakni Nasional.
15	Juara 2 Usia 6-24 bulan pada Lomba Balita Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.



16	Juara 2 Usia 24-60 pada dalam Lomba Balita Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
----	-------------------------------------------------------------------------------------